BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk baik itu di pedesaan maupun di perkotaan setiap tahunnya bertambah, secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah serta karakteristik sampah yang semakin beragam, yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut terjadi bilamana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi serta kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat rendah.

Tabel 1.1
Potensi Timbulan sampah Kota Cimahi

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Potensi Sampah m3/ Hari	Potensi Sampah Ton / Hari
2010	622.649	1463,23	365,81
2015	821.084	1929,55	482,39
2020	955.690	2245,87	561,47
2025	1.090.296	2562,20	640,55
2030	1.224.902	2878,52	719,63

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi 2013

Peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas kehidupan masyarakat di perkotaan, menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri.

Perkembangan pembangunan di berbagai aspek dan industri di Kota Cimahi tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyerapan tenaga kerja secara besar-besaran baik dari desa ke kota dan antar daerah. Bertambahnya tenaga kerja tersebut akan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingkat sosial ekonomi di Kota Cimahi meningkat pula dan volume sampah akan ikut meningkat. Peningkatan jumlah penduduk, akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan, Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya estetika bisa dilihat dari tumpukan sampah di TPS dan pasar-pasar. Sedangkan dampak kepada kesehatan masyarakat bisa berupa penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan potensi bencana lingkungan.

Pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah serta volume sampah yang sangat tinggi.

Minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi mengakibatkan lambatnya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Leuwi Goong ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah maupun Sarimukti secara langsung menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti banjir, udara yang tidak sedap,

sumber penyakit dan tentunya pada keindahan Kota Cimahi itu sendiri. Fasilitas kendaraan pengangkut sampah seperti truk maupun bak motor pengangkut sampah yang memiliki kondisi yang belum cukup baik, yang merupakan bagian fasilitas yang di miliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, telah mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di temapat-tempat pembuangan sementara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Seperti dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, penumpukan sampah yang berada di TPS Leuwi goong tidak dapat diangkut ke TPA Sarimukti karena truk pengangkut sampah yang dimilik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang biasanya dapat mengangkut 135 hingga 140 ton perminggu sekarang menjadi 80 ton sampai 115 ton perminggu di karenakan kendaraan pengangkut sampah tidak semuanya dengan keadaan yang baik. Mudah rusaknya truk-truk pengangukat sampah diakibatkan karena setiap harinya truk sampah tersebut harus mengangkut ratusan ton sampah dengan berbagai jenis sampah yang mengandung zat yang dapat merusak truk sampah.

Berikut ini data mengenai jumlah kendaraan oprasional yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi :

Tabel 1.2
Kendaraan Oprasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

NO	Jenis Kendaraan	Jumlah	Rusak
1	Arm Roll (10 m3)	4 Unit	1
2	Arm Roll (6 m3)	11 Unit	2
3	Dump Truck	9 Unit	2
4	Compactor Truck	1 Unit	-
5	Pick Up	5 Unit	1
6	Motor Roda 3	27 Unit	3

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi 2013

Berdasarkan sumber diatas, bahwa jumlah ini belum bisa mencakup sampah-sampah di Kota Cimahi, yang semakin tahun semakin bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk Kota Cimahi. Karena dari jumlah kendaraan tersebut tidak bisa beroperasi semuanya karena setiap kendaraan mengalami kerusakan yang berbeda.

Pemerintah Kota Cimahi guna mengelola sampah membuat suatu Kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi. Melalui kewenangan Walikota Cimahi bahwa urusan yang mengenai Pengelolaan Sampah, Walikota dapat menunjuk Pejabat atau Dinas terkait. Dalam hal Pengelolaan Sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi yang mempnyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah, yang dimana sudah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi untuk meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran kepada seluruh element masyarakat di Kota Cimahi mengenai kebersihan dilingkungan sekitarnya, sebagai bagian dari pelaksanaan komunikasi, hal tersebut perlu untuk diperhatikan mengingat masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat dari munculnya permasalahan sampah yang terjadi di wilayah Kota Cimahi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi harus memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah diwilayah kerjanya, dengan cara menerapkan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan yang di atur dalam Pasal 14 Perda No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan dan kesehatan lingkungan, maupun dengan cara melakukan sosialisasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, Sanksi bagi pembuangan sampah sembarangan akan terkena denda Rp.50.000.000 yang di atur dalam Pasal 14 perda No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan, yang menjadi alat kontrol bagi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Skripsi amati Pasal 14 perda No.16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan belum dapat dilaksanakan dengan baik, yang di sebabkan karena minimnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun kerja sama dengan pihak yang terkait seperti kecamatan maupun kelurahan setempat. Sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye secara aktif, penyebaran informasi tentang jenis-jenis, manfaat dan dampak sampah bagi kesehatan diri dan

lingkungan maupun upaya pendidikan dan pelatihan untuk mencetak kader-kader relawan atau tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara teknis tentang tata cara penanganan sampah organik dengan pemanfaatan peran teknologi sebagai alat bantunya.

Pelayanan yang kurang terlihat pada beberapa faktor, seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk kebersihan Kota Cimahi. Kurangnya sarana tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau oleh masyarakat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Cimahi untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya prasarana dalam hal petugas kebersihan yang kebanyakan adalah petugas lanjut usia ini berdampak pada proses pengelolaan sampah yang lambat. Dengan demikian sampah meningkat setiap tahunnya, ini dikarenakan oleh kurangnya aparatur untuk prosespengelolaan sampah di Kota Cimahi.

Tabel 1.3
Petugas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi

NO	URAIAN	STATUS	JUMLAH ORANG
1	Penyapu	PNS	21
	(76 orang)	TKK	36
		THL	19
2	Petugas TPS	PNS	7
	(13 orang)	TKK	6
		THL	-
3	Supir	PNS	13
	(22 orang)	TKK	8
		THL	1
4	Kernet	PNS	13
	(33 orang)	TKK	13
		THL	7
TOTAL PETUGAS			144 Orang

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi 2013

Berdasarkan luas wilayah Kota Cimahi yang mencapai 4.023 HA, dengan Petugas Kebersihan Kota Cimahi yang berjumlah 144 orang, belum cukup untuk menangani masalah sampah di Kota Cimahi.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, dalam penyusunan skripsi ini peneliti mengambil judul mengenai **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu. "Bagaimana implementasi kebijakan Perda No.16 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi".

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

1. Untuk mengetahui komunikasi (*comunication)* dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui sumber daya (*resources*) Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

3. Untuk mengetahui disposisi/sikap (*disposition*) Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui cara kerja struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, mengenai mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
2. Secara teoritis, peneliti megharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi teman-teman peneliti di Ilmu Pemerintahan, yang akan melaksanakan Tugas Akhir, mengenai implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Cimahi.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kota Cimahi, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permalasalahan sampah, dan lebih aktif dalam menangani permasalahan sampah di Kota Cimahi.